

BAB III

KEBIJAKAN DONALD TRUMP TERKAIT VISA TERHADAP NEGARA MUSLIM DAN TIDAK BERLAKUNYA PADA ARAB SAUDI

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai penjelasan yang terkait tentang kebijakan yang dikeluarkan pada masa kepemimpinan Donald Trump kepada tujuh negara mayoritas muslim. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan berupa hubungan yang terjalin dari tujuh negara yang mayoritas berpenduduk muslim tersebut yakni Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman dengan Amerika Serikat. Bagaimana kondisi antara masing-masing negara tersebut dengan Amerika, faktor-faktor yang mempengaruhi diberlakukannya larangan perjalanan visa masuk ke Amerika Serikat terhadap negara-negara tersebut, dan beberapa sebab tidak termasuknya warga negara asal Arab Saudi dari daftar larangan visa.

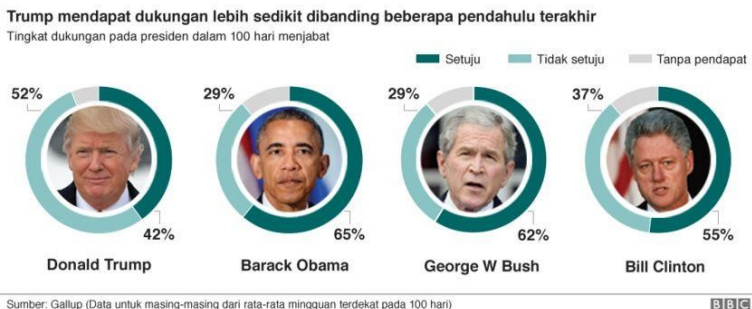
A. Kebijakan Larangan Visa Masuk Bagi Tujuh Negara Muslim

Pemilu yang diselenggarakan untuk menentukan Presiden Amerika Serikat pada 8 November 2016 berhasil dimenangkan oleh Donald Trump yang mewakili partai Republik dengan memperoleh voting sebanyak 304 suara elektoral di sekitar 30 negara bagian Trump berhasil mengalahkan lawan dari kandidat partai Demokrat yaitu Hillary Clinton yang memperoleh suara elektoral sebanyak 227 dari kurang lebih 19 negara bagian (nbcnews, 2016).

Amerika Serikat merupakan negara demokrasi sehingga pengambilan kebijakan di AS baik itu dalam maupun luar negeri dapat dipengaruhi oleh siapapun yang memiliki pengaruh kuat dan kepentingan terhadap isu tertentu. Donald Trump adalah seorang politikus dari partai Republik, mengawali karir politiknya pada tahun 1987-1999. Yang

kemudian bergabung ke partai Reformasi pada tahun 1999-2000. Tahun 2001-2009 Donald Trump bergabung dengan partai Demokrat dan memilih bergabung kembali dengan partai Republik pada tahun 2009-2011. Setelah 2011 Trump memilih untuk independen pada tahun 2011-2012, pada akhirnya Trump bergabung kembali dengan partai Republik sampai saat ini. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 mengejutkan dunia, khususnya warga Amerika Serikat. Trump berhasil menaklukkan pesaingnya dari partai Demokrat, Hillary Clinton melalui *electoral vote* pada tanggal 8 November 2016.

Pada tanggal 20 Januari 2017, ketika Donald Trump diambil sumpahnya, ternyata ada fakta lain dibalik kemenangan Donald Trump tersebut yang antara lain adalah Trump memperoleh dukungan terendah dibandingkan dengan presiden-presiden lain yang dahulu pernah menjabat sebagai pemimpin di Amerika Serikat di era sebelumnya. Kebanyakan presiden memulai jabatannya dengan memiliki dukungan yang relative tinggi, namun Presiden Trump menepis pernyataan tersebut. Jika George W. Bush dan Barack Obama memperoleh tingkat dukungan sekitar 60% pada pertengahan April, sedangkan Trump hanya memperoleh 42% dukungan.



Gambar 3.2 Tingkat Dukungan Trump Dibanding Presiden-Presiden Di Era Sebelumnya

Akan tetapi, setelah beberapa hari kemudian terjadi aksi protes atas kemenangan Trump dikarenakan pernyataan-pernyataan dari Trump yang sangat kontroversial dan adanya sumpah serapah yang dilontarkan oleh para pendukung Trump dan ditujukan kepada Hillary Clinton, umat Islam, warga kulit hitam (bahkan Obama) maupun para pendatang dari Meksiko. Sumpah serapah yang diucapkan tidak hanya melalui perkataan saja, namun melalui gambar pada baju, poster dan juga pin. “Bangun tembok itu!” merupakan salah satu kalimat yang kerap sekali diucapkan oleh para pendukung dalam kampanye Trump. Kalimat tersebut bermaksud atau merujuk kepada rencana Trump atas pembangunan tembok pembatas di perbatasan Meksiko untuk mencegah imigran yang disebutnya penuh dengan tindak kriminal masuk ke Amerika Serikat. Terlihat pula dalam rekaman video bahwa adanya pendukung Trump yang mengenakan baju bertuliskan “F*ck Islam”. Kemudian orang yang mengenakan baju tersebut telah berhasil digiring keluar oleh petugas keamanan kampanye, namun di luar justru ia memperoleh sanjungan bahkan diajak untuk berfoto *selfie*. Trump memang telah dianggap sebagai pemicu sentimen Islamofobia di Amerika Serikat terlebih dengan rencananya melarang masuk Muslim ke Amerika Serikat (Armandhanu, 2016).

Setelah dilantik pada Januari 2017, Trump kemudian mengumumkan beberapa perintah eksekutif yang dua diantaranya adalah membangun kembali angkatan bersenjata di Amerika Serikat. Termasuk pada rencana untuk kapal baru, pesawat baru dan sumber daya angkatan bersenjata yang baru (Tribun Jateng, 2017). Kemudian perintah eksekutif yang kedua diantaranya adalah melarang masuk warga yang berasal dari tujuh negara mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam waktu selama 90 hari mereka yang berasal dari maupun yang memiliki paspor kebangsaan Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman tidak diijinkan masuk ke Amerika Serikat. Larangan masuk tersebut juga diberlakukan untuk para pengunjung. Sementara itu bagi pengunjung dibekukan

izinnya oleh Donald Trump selama 120 hari lamanya (Naelufar, 2017).

Larangan kepada tujuh negara mayoritas tersebut yang kemudian menuai berbagai perdebatan dan keributan di dunia Internasional, pasalnya keputusan Donald Trump yang seperti itu secara tidak langsung menyudutkan negara mayoritas berpenduduk muslim dan sikap yang dinilai diskriminatif. Pada awal 2017 media masa dunia ramai membicarakan perihal keputusan yang dibuat oleh presiden ke 45 Amerika Serikat tersebut yang baru saja menjabat selama satu minggu namun telah mampu membuat dunia internasional kalang kabut mengenai kebijakannya tersebut. Donald Trump memiliki alasan tertentu dalam menentukan kebijakannya itu yang ditujukan kepada tujuh negara mayoritas muslim yaitu Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman. Trump beralih bahwa faktor keamanan nasional dan merujuk pada tindakan aksi terorisme yang terjadi di Paris, London, Brussels, Berlin dan Boston. Namun tidak sedikit yang menyatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Donald Trump tersebut sebagai cerminan terhadap sikap anti-Islam atau *Islamophobia* (Lumbantobing, Top 3: Kebijakan Donald Trump Terhadap Muslim?, 2017).

Berikut ini beberapa sejarah hubungan luar negeri yang dilalui Amerika Serikat dengan negara-negara mayoritas berpenduduk muslim yang memperoleh larangan masuk ke Amerika Serikat yang antara lain adalah dengan Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan yang terakhir ialah Yaman. Beberapa hubungan yang dijalin oleh Amerika Serikat dengan negara-negara tersebut melalui berbagai peristiwa naik turun dan tidak menutup kemungkinan berakhir dengan hubungan bilateral yang tidak baik antar kedua belah pihak negara. Kemudian yang menyebabkan hubungan dengan Amerika Serikat menjadi renggang sehingga memunculkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump kepada negara-negara tersebut.

Hubungan Amerika Serikat - Iran. Diawali dengan adanya program nuklir Iran yang telah menjadi sorotan perhatian berbagai pihak kalangan, termasuk dunia, Amerika Serikat, dan beberapa negara yang berada di kawasan Timur Tengah memandang bahwa kepemilikan nuklir tersebut. Awal mula nuklir Iran dikembangkan sebagai bentuk proses menyangga yang merupakan suatu bagian dari program yang diinisiasi Amerika Serikat pada saat kepemimpinan Reza Pahlevi, terhadap pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah pada masa Perang Dingin. Pada saat itu Iran dan Arab Saudi merupakan basis pertahanan dan termasuk partner utama Amerika Serikat. Namun setelah terjadi peristiwa Revolusi Islam di Iran pada tahun 1979, Revolusi itu berawal mula pada peristiwa-peristiwa di tahun 1953. Ketika PM terpilih Mohammad Mossadegh yang menasionalisasi sumber minyak Iran, digulingkan oleh CIA dan kemudian digantikan oleh militer yang memungkinkan kepulangan Shah Iran yang melarikan diri ke Roma.

Konfrontasi antara Shah Iran dan pihak oposisi kian memanas, ketika kelompok republik, kelompok kiri, dan kelompok muslim bangkit. Dengan bantuan dinas rahasia, Shah memburu dan menindas kelompok oposisi. Namun sebagai dampak yang ditimbulkan dari penanganan kudeta, Iran semakin tergantung pada Amerika Serikat. Angkatan perang Iran kemudian dilengkapi dengan senjata-senjata mutakhir dan modern milik Amerika Serikat. Posisi Iran semakin memburuk, terlebih Amerika Serikat rupanya kian tidak peduli dengan bekas sekutunya tersebut. Sebab kali ini Washington tidak memberikan bantuan seperti yang terjadi pada tahun 1953 silam. Kemudian pada November 1978 militer mengambil alih kekuasaan. Upaya Reza Pahlevi untuk menyelamatkan keadaan pada bulan Januari 1979 dengan mengangkat Shahpur Bakhtiar sebagai PM. Beberapa hari kemudian Shah Iran meninggalkan Iran. Kemudian pada 5 Februari Bakhtiar mengundurkan dan melarikan diri. Dua

tahun selanjutnya dia dibunuh di Paris setelah terjadinya Revolusi Islam di Iran (DW, 2009).

Peristiwa Revolusi Islam menjadi suatu peristiwa yang besar yang terjadi di Timur Tengah, pasalnya peristiwa yang dipelopori oleh Ali Shariati dan Ayatollah Khomeini mulai memuncak di Iran, Syi'ah islam muncul sebagai ideologi bagi gerakan pemersatu massa yang efektif. Bentuk negara berubah dari monarki absolut menjadi sebuah Republik Islam yang berdasarkan pada ajaran agama Islam bermazhab Syi'ah. Perubahan ideologi tersebut yang menyebabkan hubungan dari kedua negara menjadi kurang baik bahkan dapat dikatakan bersitegang. Pasca revolusi Islam tersebut muncul kekhawatiran dari Barat, bahwa revolusi Islam akan berdampak bagi kebangkitan umat Islam khususnya aliran Syi'ah di berbagai belahan negara lain. Sejak saat itulah hubungan antara Amerika Serikat dengan Iran diwarnai gejala sampai adanya adu kekuatan terutama dalam bidang nuklir (Hormozi, 2011).

Amerika Serikat pun menentang penuh segala upaya Iran dalam hal pengembangan nuklir, meskipun pada awalnya hanya sebatas untuk keperluan sumber energi. Begitu juga sebaliknya, Iran mengambil langkah sikap oposisi terhadap banyak kebijakan Amerika Serikat utamanya yang berkaitan dengan nuklir. Namun di balik itu semua, Iran masih bersedia untuk menerima kunjungan IAEA (*International Atomic Energy Agency*) merupakan Badan Tenaga Atom Internasional yang bertugas untuk mengawasi perkembangan nuklir. Walaupun begitu, hal ini tidak lantas membuat Iran menghentikan pengembangan nuklirnya. Terlihat dengan keadaan yang kembali memanas pada tahun 2003 Presiden Iran saat itu yang dijabat oleh Khatami kembali membuka proyek nuklir Iran dan mengembangkannya secara serius. Walaupun Iran menegaskan bahwa nuklir yang dikembangkan adalah untuk tujuan damai, namun dunia internasional masih tetap mengkritik aksi Iran tersebut. Terlebih kecurigaan

Amerika Serikat yang cukup beralasan karena Iran telah serius dalam mengembangkan misil balistik. Kemudian pada tahun 2009, Iran telah berhasil menguji coba misil yang berdaya jangkauan sampai sejauh 1500-1800 km yang dapat menjangkau Israel (Jakobsen, 2010).

Persepsi Amerika Serikat tentang situasi di Timur Tengah serta sifat dari ancaman tersebut berubah radikal semenjak tahun 1970an, sebagian besar disebabkan oleh ledakan politik Islam yang berhamburan masuk ke dalam lingkup politik. Peristiwa-peristiwa regional seperti Perang Arab-Israel di tahun 1973, akibat embargo minyak Arab, kemudian revolusi Iran di tahun 1978-1979 yang diikuti dengan krisis penyanderaan sehingga mengejutkan banyak pejabat Amerika Serikat yang kemudian memandang Islam sebagai ancaman bagi kepentingan-kepentingan Barat. Dan adanya perhitungan keamanan, serta pertimbangan-pertimbangan politik dan ekonomis yang saling berkaitan menjadi dasar perubahan pandangan Amerika Serikat (Gerges, 1999).

Hubungan Amerika Serikat - Irak. Bantuan yang diterima Irak sepanjang waktu perang Teluk yang pertama berubah menjadi sebuah serangan militer terhadap pemerintahan Saddam Husein. Hubungan yang terjalin antara Amerika Serikat dengan Irak sebetulnya dipengaruhi oleh beberapa motif. Pada awalnya, Amerika Serikat melihat Irak bukan sebagai negara ancaman bagi negaranya, tetapi sebagai negara yang diberi bantuan militer terhadap konflik yang sedang terjadi antara Irak dengan Iran pada perang Teluk I. pada saat itu, Amerika Serikat memandang rezim Khomeini sebagai sebuah ancaman dan kemenangan Iran harus dicegah bagaimanapun dan dihancurkan. Amerika Serikat dan beberapa negara Arab lainnya pun turut khawatir bahwa Iran akan menjadi negara yang kuat dalam bidang militer sehingga Amerika Serikat mendukung Irak dengan memberikan bantuan

militer dan dana demi mencegah kemenangan atas Iran (Sejarah-Negara.com, 2014).

Dukungan Amerika Serikat untuk Irak kemudian berbalik ketika Irak sudah memulai menjadi ancaman bagi kepentingan nasional Amerika Serikat. Irak sudah mendapat intervensi militer dari Amerika Serikat yang mengatasnamakan penegakan Hak Asasi Manusia atas serangan militer Irak terhadap Kuwait. Upaya permintaan pengesahan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB mendapatkan hasil positif dengan disahkannya 12 resolusi dimulai dari kecaman, pengerahan pasukan multinasional, blokade ekonomi, hingga persetujuan penggunaan persenjataan militer. Dari resolusi tersebut tidak heran mengingat bahwa PBB selama ini telah menjadi alat hegemoni Amerika Serikat (Pratama, n.d.). Selanjutnya invasi dan aneksasi Irak atas Kuwait berkembang menjadi konflik terbuka antara Irak dan Amerika Serikat. Tepatnya hanya karena harga diri Saddam Husein dan George W. Bush, perang Teluk kedua pun tidak dapat terhindarkan. Semua ini disebabkan karena secara tidak langsung perang Teluk II mengancam kepentingan Amerika Serikat mengingat bahwa ladang minyak di Kuwait yang setiap harinya telah memasok dollar ke Amerika Serikat tiba-tiba direbut oleh Irak. Oleh karena itu, Amerika Serikat merancang resolusi dan dengan segala kekuatan berupaya meminta pengesahan Dewan Keamanan PBB untuk mengusir dan melumpuhkan militer Irak. Alasan yang dilontarkan dari pihak Amerika Serikat yakni bahwa Irak telah melanggar hukum internasional dan hak rakyat Kuwait untuk bernegara harus segera dipulihkan. Pada akhirnya Dewan Keamanan PBB mengesahkan 12 resolusi tersebut (Daulay, 2009).

Hubungan Amerika Serikat – Libya. Kebijakan serta tujuan kebijakan Amerika Serikat terhadap negara Libya dilakukan melalui tiga administrasi. Tujuan Amerika Serikat antara lain adalah untuk menghentikan dukungan Libya

terhadap terorisme, mencegah kemampuan Tripoli untuk menghasilkan senjata pemusnah massal dan menahan ambisi regional Qaddafi. Kemudian Amerika Serikat juga menambahkan tujuan-tujuan lain diantaranya termasuk tanggungjawab terhadap keadilan. Sebelum rezim Qaddafi memimpin Libya, Amerika Serikat mempunyai hubungan yang baik dengan Libya dengan membawa kepentingan operasional pangkalan militer dan kepentingan minyak di Libya. Namun setelah kepemimpinan ditangan Qaddafi pada 1969, hubungan antara Libya dengan Amerika Serikat perlahan luntur. Rezim pemerintahan Qaddafi dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan-kepentingan Amerika Serikat tersebut, sehingga arah pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat didominasi oleh beberapa isu terkait Libya (Patrick, 2011).

Di awal era 1970an Presiden Libya Muammar Qaddafi menggunakan simbol-simbol Islam untuk melegitimasi kekuasaan populisnya serta menekan gerakan-gerakan revolusioner di seluruh Timur Tengah dan Afrika. Menurut seorang pejabat Amerika Serikat yang pada saat itu duta besar untuk sebuah negara di Afrika Tengah, diplomat-diplomat Amerika Serikat, baik itu di Washington DC maupun di Afrika, terganggu dengan tindakan proklamasi Qaddafi akan negara Islam, promosinya akan Islam sebagai agama “bangsa hitam” di Afrika, serta penyebaran “radikalisme” dan “terorisme” Islamnya ke seluruh dunia. Mereka takut jikalau Islam radikal bergerak maju menguasai seluruh penjuru padang pasir. Namun pada kenyataannya, kampanye Islam yang dilakukan oleh Qaddafi mempengaruhi pandangan resmi Amerika Serikat mengenai kebangkitan kembali Islam, jauh sebelum revolusi Iran.

Menanggapi krisis yang terjadi di Libya, Amerika Serikat yang pada saat itu dipimpin oleh Barack Obama kemudian menyusun strategi, yakni menggunakan armada militer dan berkoalisi dengan pihak yang lebih meluas, serta

memperoleh legitimasi dari Dewan Keamanan PBB. Dengan strategi yang seperti itu, Amerika Serikat mempunyai tujuan jangka pendek yang berupa menghentikan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Muammar Qaddafi terhadap rakyat sipil Libya, serta tujuan jangka panjang untuk melengserkan Qaddafi dari kepemimpinannya di Libya. Amerika Serikat pun berhasil meraih dua tujuan tersebut melalui kebijakan Humanitarian Intervention. Yang dilakukan Amerika Serikat terhadap kebijakan Humanitarian Intervention di Libya begitu menekankan norma Responsibility to Protect (RtoP) yang dihubungkan dengan pelanggaran HAM dan beberapa kejahatan yang terjadi selama kepemimpinan Qaddafi (Patrick, 2011).

Hubungan Amerika – Somalia. Dalam KTT yang dihadiri oleh para pemimpin Amerika Serikat dan Afrika yang diselenggarakan pada 2014 direncanakan membahas beberapa masalah yang paling menonjol di Afrika saat itu, seperti missal wabah penyakit Ebola di Afrika Barat, kasus penculikan-penculikan, pembunuhan yang dilakukan oleh organisasi Islam ekstremis di Nigeria, kemudian adanya perang saudara di Sudan Selatan, Somalia, dan Kenya; lalu yang terakhir adanya bahasan mengenai dorongan kerjasama ekonomi antara Amerika Serikat dan negara-nega Afrika. Meskipun banyak kalangan yang bertanggungjawab menyatakan bahwa KTT tersebut membahas banyak masalah panas di Afrika, namun target utama yang dituju oleh semua pihak adalah mendorong kerjasama ekonomi, hal tersebut yang membuat penasehat keamanan nasional presiden Amerika Serikat Barack Obama yaitu Susan Rice yang menegaskan bahwa orang Amerika Serikat perlu membuka dan mengubah pola pikir yang terbelakang mengenai Afrika. Dengan alih-alih hanya melihat pada ketegangan, bentrokan, penyakit, dan kemiskinan, Amerika Serikat seharusnya melihat Afrika sebagai negara yang beraneka dan penuh dengan pembaharuan. Tidak dapat dipungkiri hubungan Amerika Serikat dengan Afrika masih mengalami beberapa kendala, akan tetapi sangat jelas bahwa KTT AS-Afrika yang pertama merupakan kesempatan supaya

kedua pihak dapat saling memperkuat kerjasama, saling memahami mitra merupakan langkah awal untuk mengarah pada hubungan yang lebih baik di waktu mendatang (Van, 2014).

Pertama kali Amerika Serikat mengirim pasukan darat ke Somalia pada tahun 1993, di mana sebanyak 18 anggota pasukan khusus yang tewas akibat melawan milisi di Mogadishu. Peristiwa tersebut kemudian didramatisir dalam film yang berjudul *Black Hawk Down*. Seorang juru bicara militer Amerika Serikat mengatakan bahwa puluhan prajurit dari 101st Airborne Division akan melatih pasukan Somalia supaya lebih berkompeten dalam hal melawan Al-Shabaab, yang merupakan kelompok ekstremis terafiliasi Al-Qaeda. Beberapa bulan yang lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani rencana kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) untuk meningkatkan operasi melawan Al-Shabaab, termasuk dalam meningkatkan jumlah serangan udara. Mengirim pasukan ke wilayah Somalia adalah pertanda baru dari pendekatan intervensi Trump, yang dahulu semasa kampanyenya memberikan kritik langkah pemerintahan Obama yang dianggap kurang bertindak dalam beberapa konflik asing. Sejauh ini Trump telah menindak beberapa konflik asing seperti halnya memerintahkan peluncuran misil di Suriah, memasuki semenanjung Korea untuk menghadapi ancaman nuklir dan misil Korea Utara, dan juga menjatuhkan bom terbesar untuk menghancurkan sejumlah goa yang dipergunakan oleh militan Islamic State (ISIS) lokal di Afghanistan. Somalia sendiri telah dilanda perang sejak tahun 1991, pemerintahnya pun bergantung pada dukungan dari negara-negara asing, termasuk pada Amerika Serikat, dan sebanyak 22.000 prajurit Uni Afrika. Meskipun Al-Shabaab sudah banyak kehilangan wilayah semenjak diusir dari Mogadishu pada tahun 2011, namun para militannya masih dapat melancarkan serangan dari waktu ke waktu kapanpun (Haryono, 2017).

Hubungan Amerika Serikat – Sudan. Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi terhadap Sudan sejak tahun 1997 silam serta memasukkan negara Afrika tersebut ke dalam daftar negara yang mendukung terorisme. Pemerintah Sudan kemudian mendesak Amerika Serikat agar lebih mempertimbangkan kembali sanksi sepihaknya kepada Sudan. Pemerintah Sudan memandang bahwa sanksi tersebut telah merugikan rakyatnya dan mempengaruhi kondisi perekonomian negeri itu. Kantor Pemantauan Aset Luar Negeri di Departemen Keuangan Amerika Serikat (OFAC) yang mengumumkan telah meringankan sanksi AS atas Sudan dengan mengizinkan ekspor perangkat keras dan perangkat lunak komunikasi pribadi termasuk *smartphone* dan laptop (Ariwibowo, 2015).

Pada Oktober 2017 lalu, pemerintah Sudan menyatakan keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencabut sanksi AS atas Sudan secara penuh dan definitif, sebagai perkembangan penting dalam sejarah hubungan antara kedua negara tersebut. Pencabutan sanksi yang dilakukan pada 6 Oktober 2017 itu dinilai sebagai hasil murni dari sebuah dialog terbuka, transparan, dan konstruktif upaya dalam mengatasi permasalahan kedua negara dan dipimpin dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab oleh Presiden Republik Sudan, Omar Hassan Ahmed al-Bashir, dan partisipasi yang aktif dan sungguh-sungguh dari berbagai institusi terkait dari kedua belah pihak. Menyusul keputusan tersebut, Sudan sepenuhnya menegaskan komitmen untuk selalu menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat dalam berbagai permasalahan dalam kancah bilateral, regional, dan internasional yang menjadi sorotan bersama, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, perang melawan segala bentuk terorisme, migrasi ilegal dan juga perdagangan manusia, hal-hal tersebut yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Sudan, Gharib Allah Khidir dalam keterangan tertulisnya.

Gharib juga mengatakan bahwa Sudan bercita-cita untuk membangun kembali hubungan normal dan dapat terus berkembang dengan Amerika Serikat. Namun, hal tersebut sudah pasti menuntut penghapusan nama Sudan dari daftar negara yang menjadi sponsor pendukung terorisme karena hal itu tidak relevan dengan Sudan, menghentikan beberapa langkah negatif atas Sudan yang diambil dan didukung oleh intitusi-institusi Amerika Serikat di tingkat Internasional, dan pengambilan tindakan positif untuk memungkinkan Sudan memperoleh keringanan hutang, seperti halnya kasus yang menimpa banyak negara dengan kondisi pembangunan yang serupa. Sudan juga memberikan penegasan komitmen untuk selalu menjalankan tanggung jawab dalam memelihara keamanan dan kepentingan nasional demi menciptakan kemajuan dan kesejahteraan rakyat, menjadi dialog diplomasi sebagai satu-satunya jalan yang ditempuh untuk mewujudkan dan menjaga stabilitas keamanan dalam negeri, memperkuat hubungan dan membangun jembatan komunikasi secara berkesinambungan dengan semua negara di dunia, serta selalu berperan secara aktif dalam usaha mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan benua Afrika (Raharja, 2017).

Hubungan Amerika Serikat – Suriah. Di masa lalu, perubahan politik radikal di negara-negara otoritarian harus diawali dengan keterlibatan Amerika Serikat dengan perekonomian yang dikuasai negara tersebut. Walaupun begitu, dengan kemajuan globalisasi dan gerakan negara-negara seperti Suriah menuju pasar kapitalis, sektor swasta Amerika Serikat saat ini dapat terlibat pada bisnis Suriah secara langsung tanpa melalui rezim Suriah. Akan tetapi, untuk melakukannya dengan benar, Washington harus mempertimbangkan kembali kebijakannya terhadap Suriah dan negara-negara seperti itu, serta mendorong sektor swasta Amerika untuk menggunakan *soft power* demi hubungan yang lebih baik. Pendekatan tersebut harus ditempuh melalui jalan yang panjang untuk dapat memperbaiki reputasi Amerika di dunia dan mendorong saling pengertian (Tabler, 2007).

Selama ini tuduhan yang sering dilontarkan kepada masyarakat Suriah adalah bagian dari kepanjangan tangan kepentingan politik Amerika Serikat. Bahwa ada beberapa faksi politik yang memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Namun, menstigma tuntutan masyarakat Suriah sebagai skenario Amerika Serikat sangat tidak tepat. Sebab momentum revolusi tahun 2011 merupakan akumulasi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang selama ini menghinggapinya masyarakat Suriah. Masyarakat Suriah sendiri sebetulnya menolak kehadiran Amerika Serikat, dibuktikan dengan adanya demonstrasi besar-besaran masyarakat atas pandangan teroris oleh Amerika Serikat kepada sejumlah kombatan di Suriah. Tragedi kejahatan terhadap kemanusiaan bukanlah permasalahan yang baru dalam sejarah di Suriah. Masih teringat begitu jelas dalam ingatan dunia pembantaian terhadap manusia terbesar terjadi pada 2 Februari 1982 (versi Amnesty Internasional). Pembantaian yang lebih dikenal dengan “Majzarah al Hama 1982” atau “Hama Massacre 1982” merupakan satu operasi militer terbesar yang dikerahkan oleh rezim Suriah terhadap gerakan oposisi. Operasi tersebut telah merenggut nyawa berpuluhan ribu penduduk kota Hama, Suriah. Operasi tersebut berlangsung selama 27 hari. Tentara pemerintah junta militer Haafez al Assad, ayah kandung dari Bashar, telah mengepung dan memborbardir kota Hama, kemudian setelah itu menyerang dengan pasukan darat. Tentara rezim melakukan pembantaian yang sangat brutal dan sadis hingga merenggut puluhan ribu nyawa penduduk sipil. Pemimpin operasi yang dinilai tidak berperikemanusiaan itu tidak lain adalah Kolonel Rifaat al Assad, yaitu saudara kandung dari diktator Hafez al Assad. Penindasan tersebut masih berlanjut hingga melestusnya perang Suriah yang terjadi pada tahun 2011. Sejumlah anak-anak yang menuliskan kata-kata protes terhadap rezim justru dihadapi dengan tindakan kekerasan. Maka dari itu timbul demonstrasi damai, namun sayangnya pemerintah menghadapinya dengan rentetan senjata.

Maka dari itu, cara terbaik dalam menyelesaikan krisis Suriah adalah dengan menghukum Bashar atas kejahatan perang dan kemanusiaan. Itulah kemauan terdalam mayoritas masyarakat Suriah yang mereka suarakan melalui demonstrasi damai pada tahun 2011. Selanjutnya, mengeluarkan tentara asing dari Suriah. Kedatangan pasukan tentara asing ke Suriah dengan alasan untuk memerangi terorisme justru kian memperburuk keadaan dan kondisi keamanan di Suriah. Alih-alih memberantas dan melawan teroris, negara-negara Barat justru ikut terlibat dalam pembunuhan masyarakat sipil Suriah, di Aleppo, Idlib, Hama, dan kota-kota lainnya. Kemudian, untuk menciptakan Suriah yang damai dan mengakhiri konflik yang berkepanjangan, maka Suriah menyerahkan masa depan negaranya kepada rakyat di bawah arahan para ulama yang selama ini telah senantiasa membimbing dan mendampingi mereka (Pizaro, 2017).

Hubungan Amerika Serikat – Yaman. Perang saudara dan campur tangan Arab Saudi di Yaman sehingga telah menewaskan sedikitnya sebanyak 10.000 jiwa sejak tahun lalu, kata Koordinator Kemanusiaan PBB Jamie McGoldrick, angka ini diperoleh dari berbagai fasilitas kesehatan dan rumah sakit di Yaman. Sesungguhnya apa yang tengah terjadi di ujung selatan semenanjung Arab tersebut, dan apa sebabnya pemerintah Saudi melancarkan perang melawan kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar Yaman? Dan ada hubungan apa dengan sikap pemerintah Amerika Serikat yang mendukung Arab Saudi?

Wartawan senior majalah Harper's yang terbit di Amerika Serikat yaitu Andrew Coburn mengatakan bahwa pemerintah Saudi yang beraliran Sunni merasa ketakutan akan melihat kekuatan kelompok Houthi yang beraliran Syi'ah, yang konon mendapat dukungan dari negara Iran dan merupakan musuh terbesar Arab Saudi. Arab Saudi takut bahwa Iran kelak akan membangun pengkalan di perbatasan selatannya. Namun sebenarnya hanya ketakutan yang tidak memiliki alasan, karena Iran tidak bermaksud seperti apa yang

dipikir oleh Arab Saudi. Iran memang memiliki hubungan dengan kelompok Houthi yang merupakan kelompok agama minoritas di Yaman bagian utara yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Hanya berselang dua minggu lamanya setelah koalisi yang dibentuk Arab Saudi melancarkan serangan atas Yaman dengan bantuan pesawat dan bom buatan Amerika Serikat, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Tony Blinken pada saat itu bertolak ke Riyadh untuk meminta klarifikasi. Blinken bertanya kepada pihak Arab Saudi mengenai pengeboman tersebut, kemudian pihak Arab Saudi menjawab bahwa mereka ingin memusnahkan kelompok Houthi, yang dianggapnya sebagai kekuatan pro-Iran di Yaman.

Blinken menyampaikan kepada pihak Arab Saudi bahwa ia sepakat jikalau kelompok Houthi harus dicegah supaya tidak berkuasa di Yaman dan pemerintah Saudi melihat sikap Amerika Serikat yang semacam itu memperlihatkan persetujuan tersirat untuk melancarkan pengeboman siang dan malam di Yaman, kata Andrew Coburn, namun melihat dari Indeks Pembangunan Manusia PBB, Yaman merupakan salah satu negara yang paling miskin di dunia, termasuk dalam urutan ke 154 dari 187 negara. Satu dari setiap warga negara Yaman atau 20% penduduknya mendapat masalah pada kelaparan, dan satu dari setiap tiga orang tidak memiliki pekerjaan. Setiap tahun sebanyak 40.000 anak-anak meninggal sebelum berusia lima tahun dan para pakar pula mengatakan bahwa negara tersebut akan kehabisan terkait sumber-sumber air minum dalam waktu dekat.

Chris Murphy, seorang senator Partai Demokrat sangat menentang atas dukungan Amerika Serikat pada kampanye pengeboman Arab Saudi di Yaman, adanya keterlibatan Amerika dalam setiap kematian warga sipil di Yaman. Dikarenakan pemerintah Saudi tidak akan bisa menggunakan pesawat tempur dan menjatuhkan bom tanpa bantuan dari Amerika Serikat. Mereka menggunakan senjata buatan Amerika yang dijual kepada pemerintah Arab Saudi. Dinas

intelijen pun turut membantu pihak Saudi untuk memilih target untuk diserang. Amerika Serikat secara tidak langsung turut berperang di Yaman, untuk melawan pemberontak Houthi yang jelas sama sekali merupakan bukanlah ancaman bagi keamanan Amerika Serikat, Kongres Amerika Serikat dapat menghentikan penjualan senjata ke Saudi, namun wartawan Andrew Coburn mengatakan bahwa ini akan bertentangan dengan kebijakan pemerintah Amerika untuk mendukung industri persenjataannya. Sedangkan pemerintah Amerika telah mengumumkan penjualan senjata kepada Arab Saudi bernilai sampai 60 miliar dollar, yang terbesar dalam sejarah Amerika. Penjualan tersebut mencakup pesawat tempur F-15, bom dan peluru kendali dan segala peralatan yang terkait (voaindonesia, 2017).

Dari beberapa sejarah hubungan antara Amerika Serikat dengan beberapa negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika tersebut sudah sangat jelas bahwa tujuh negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim antara lain Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman merupakan negara-negara yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan maupun operasi terorisme, tidak lain adanya negara yang memberikan bantuan kepada teroris, dan ada pula negara yang termasuk dalam kategori negara rawan terorisme dunia. Maka dari itulah, Donald Trump mecanangkan kebijakan larangan visa masuk Amerika Serikat kepada tujuh negara tersebut selama 90 hari semenjak 29 Juni 2017 ketika kebijakan mulai diberlakukan.

B. Kebijakan Pembebasan Atas Larangan Visa Terhadap Arab Saudi

Pasca tragedi 9 September 2001, terjadi perubahan yang begitu drastis terhadap isu-isu global dalam bidang *International Security* dan fokus utama setiap negara antara lain adalah kasus terorisme, hak ini yang kemudian menciptakan aturan-aturan baru yang mengarah kepada penanganan-penanganan kasus terror. Terorisme itu sendiri

pada saat ini dapat dilihat sebagai suatu isu yang utama dalam percaturan dunia yang memiliki kontribusi dalam sistem keamanan internasional. Patron dan arah dari terorisme kini lebih mengarah pada suatu penekanan pada paham ideologi yang bagi masyarakat umum merupakan suatu isu yang sangat sensitif dikarenakan mengarah pada unsur agama yang notabene merupakan suatu keyakinan yang dianut oleh masing-masing individu. Teror ini yang kemudian menjadi rasa ketidakpuasan atas sesuatu rezim yang menekan suatu ideologi maupun agama tertentu.

Dalam konteks terorisme global dewasa ini tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan peran Al-Qaeda yang merupakan teroris fundamentalis yang selalu membawa isu agama sebagai paham yang menekankan pada kebersamaan dan memiliki rasa antipasti yang tinggi terhadap dominasi negara-negara barat khususnya Amerika Serikat. Arah dan tujuan Al-Qaeda yang memiliki arah pada terror global dan terorganisir serta memiliki jaringan structural yang mengglobal dibawah pemimpinnya yang kharismatik yaitu Osama bin Laden. Dibawah kepemimpinan Osama bin Laden, Al-Qaeda berubah menjadi jaringan teroris yang sangat ditakuti dan begitu dominan dalam segala aksi terror di dunia pada satu dasawarsa akhir ini (Agung Y. Nugroho, 2016).

Tidak termasuknya negara yang tergolong dalam negara berpenduduk mayoritas Muslim ini antara lain Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Turki. Namun dari keempat negara tersebut tidak satupun dari mereka termasuk dalam daftar larangan visa yang telah dicanangkan oleh Donald Trump yang sudah mulai berlaku pada 29 Juni 2017 lalu. Tidak termasuknya dalam daftar larangan Trump bagi beberapa negara yang tergolong pada negara yang mayoritas berpenduduk Muslim telah memunculkan berbagai pertanyaan yang serius. Misalnya Arab Saudi, negara kerajaan tersebut tidak termasuk dalam larangan visa masuk ke Amerika Serikat, meskipun pada faktanya bahwa pemerintah eksekutif tersebut berkali-kali merujuk pada peristiwa serangan teroris

yang terjadi di Gedung Kembar WTC 11 September 2001, sementara sebanyak 15 dari total 19 teroris pembajakan 9/11 ini berasal dari Arab Saudi. Arab Saudi pula merupakan negara di mana tempat Osama bin Laden dilahirkan dan juga kewarganegaraan dari pemimpin kelompok teroris Al-Qaeda tersebut.

Pada masa kepemimpinan Barack Obama dalam memimpin negara Amerika Serikat, Obama telah berikrar untuk melindungi sekutu-sekutunya di Teluk Arab dengan segala kekuatan militer jika diperlukan ditengah ketegangan dengan Iran. Pernyataan yang dikemukakan Obama setelah pertemuan dua hari dengan enam negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk Arab (GCC) yang antara lain mencakup Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, dan Uni Emirat Arab. Amerika Serikat akan melindungi para mitra GCC dalam hal melawan serangan eksternal, Obama juga memiliki harapan kerjasama akan membantu mencapai hubungan ‘bertetangga yang baik dan damai dengan Iran’. Dalam pertemuan dengan anggota GCC tersebut, Amerika Serikat membahas tindakan yang tepat ketika ancaman datang, termasuk dalam penggunaan kekuatan militer. Ada pula membahas kontraterorisme, keamanan siber, dan pertahanan rudal balistik. Hubungan antara Amerika Serikat dengan para sekutunya di Teluk Arab mulai menegang setelah Obama membuat kesepakatan perundingan nuklir dengan Iran (BBC, 2015).

Jadi apakah yang menyebabkan Arab Saudi tidak dimasukkan dalam daftar larangan bersamaan dengan tujuh negara lain? Walaupun petinggi Trump telah mengelak dengan mengambil kutipan dari daftar Terrorist Travel Prevention Act of 2015 di era kepemimpinan Obama sebagai pembenaran inti untuk opsi menentukan negara mana saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam daftar larangan, tetapi para kritikus mengatakan tentu adanya alasan yang lain yang melatarbelakangi hal tersebut. Arab Saudi diduga sebagai salah satu negara yang terlalu berharga sebagai sekutu bagi

Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Adanya laporan dari Whatsupic bahwa Penasihat Keamanan Cyber Presiden Donald Trump yang bernama Rudy Giuliani mengatakan dalam kesempatan wawancaranya dengan Fox News bahwasannya Arab Saudi telah melakukan perubahan yang dinilai besar dan mempunyai hubungan dekat dengan Amerika Serikat sendiri dan Israel.

Maka dari itu Arab Saudi tidak disebutkan dalam daftar negara yang dilarang untuk memasuki Amerika Serikat. Tidak hanya itu, tidak termasuknya Arab Saudi dalam daftar larangan tersebut juga dikarenakan presiden dan penasihatnya telah mencoba untuk menghindari konflik dengan mitra dagang yang begitu signifikan dan memiliki banyak keuntungan yang dapat membantu negara Amerika Serikat dalam berbagai sektor. Walaupun Reince Priebus, selaku Kepala Staf Gedung Putih membantah bahwa pemilihan beberapa negara yang dilarang ini dipengaruhi oleh hubungan bisnis Trump dan mengatakan bahwa mereka ini dipilih untuk melindungi Amerika Serikat dari ancaman terorisme yang kemungkinan besar berasal dari negara-negara yang telah diidentifikasi oleh Kongres dan pemerintahan Obama, para kritikus pun telah melakukan pencatatan bahwa beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Muslim yang tidak terdaftar dalam daftar larangan imigrasi memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan Donald Trump, termasuk Arab Saudi, nyatanya di Arab Saudi terdapat sebanyak delapan perusahaan milik Trump disana (ArrahmanNews, 2017).

C. Isu Terkait Visa dan Non Visa

Ada keuntungan suatu negara yang memiliki kebijakan visa on arrival, yang paling jelas adalah meningkatnya jumlah wisatawan dari negara-negara lain masuk ke suatu negara. Multiplier effect dari meningkatnya jumlah wisatawan ini tentunya perekonomian negara-negara tersebut, misalnya pertemuan bisnis antar negara menjadi lebih

mudah, peningkatan occupancy rate hotel, meningkatnya pendapatan travel agents, berkembangnya industri kecil yang bergerak dibidang pariwisata, dan sudah pasti akan memudahkan wisatawan asing untuk masuk ke suatu negara tanpa harus susah payah mengurus aplikasi Visa ke Kedutaan Besar.

Tetapi ada juga resiko yang di hadapi suatu Negara dengan kebijakan Kunjungan Bebas Visa tersebut; antara lain kebijakan itu berarti kata pengamat isu-isu keamanan: “On the flip side it would mean allowing unknown people into the country as there will be no time to look into their credentials.” Atau di sisi lain kebijakan itu adalah membiarkan masuknya orang tidak dikenal ke suatu negara tanpa adanya pengecekan kredensial mereka berupa dokumen-dokumen penting yang di perlukan (Hananto, 2016).

Pemerintah Amerika Serikat telah meningkatkan metode penyaringan baru terhadap orang-orang yang akan masuk ke negara tersebut. Terhitung sejak 25 Mei 2017, AS meminta para calon pendatang yang mengajukan visa ke sana untuk memberitahukan identitas di media sosial. Dikutip dari *Daily Mail* pada Sabtu (3/6/2017), seorang petinggi State Department yang dirahasiakan namanya menjelaskan bawa prosedur baru keamanan itu diterapkan pada mereka yang berpotensi melakukan kejahatan. Rencana tersebut telah memicu kekhawatiran di kalangan pembela kebebasan sipil, yang berpandangan bahwa mereka yang tidak berisiko menjadi teroris dapat dicurigai hanya berdasarkan pandangan politik atau agama.

Sebelumnya, melalui suatu memorandum tertanggal 6 Maret 2017, Presiden Donald Trump berjanji memperketat pengaturan atas siapa yang boleh masuk ke Amerika Serikat, termasuk dengan mempelajari perilaku calon pengunjung di dunia maya. Menurut wanita pejabat dari Gedung Putih tersebut, para pejabat konsuler sekarang boleh meminta informasi tambahan dari para pelamar visa yang diduga

memerlukan "pemeriksaan keamanan nasional secara lebih ketat." Menurutnya, "Pelamar visa tersebut akan diminta untuk menyediakan informasi tambahan, termasuk rincian media sosial, nomor-nomor paspor sebelumnya, informasi tambahan tentang anggota keluarga, riwayat lebih panjang terkait perjalanan, pekerjaan, informasi kontak." Namun demikian, pejabat itu menambahkan bahwa perubahan tersebut akan "berdampak hanya kurang dari 1 persen dari setidaknya 13 juta pelamar visa dari seluruh dunia setiap tahunnya."

Tidak disebutkan adanya permintaan kata sandi (*password*) dari para pelamar visa. Walaupun begitu, jika pelamar visa mengunggah materi mencurigakan ke Facebook atau mengikuti suatu akun ekstremis di Twitter atau Instagram, maka calon itu akan ditanyai lebih mendalam. Selain aturan baru ini, administrasi AS belum lama ini juga menerbitkan larangan penggunaan *laptop* untuk penumpang penerbangan yang berangkat dari bandara beberapa negara Muslim. Larangan itu diterbitkan setelah agen-agen intelijen menemukan bukti bahwa kalangan ekstremis telah menyempurnakan teknologi menyembunyikan bom dalam komputer jinjing (Lumbantobing, Informasi Media Sosial, Syarat Baru Ajukan Visa Amerika Serikat, 2017).